

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Nagari Ampiang Perak, Sumatera Barat ¹

LUCKY ZAMZAMI ²

Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas Padang

Abstract

The research is focused on the evaluation of Coastal Community Economic Empowerment Program (PEMP) in Ampiang Perak Village, Sutera Sub District, South Bay of West Sumatera. PEMP is a program created by government to improve people's lives in coastal area of West Sumatera. A qualitative study revealed that microcredit plan and boat engine loans of PEMP were less in accordance with existing concept being formulated before. This is due to cultural matters, such as unproductive lifestyle, lazyness, inefficiency, lack of education, dependency on broker/middleman, and low level of competence on technology of fishing machineries.

Riset ini difokuskan pada evaluasi terhadap program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Perkampungan Ampiang Perak, Sub Distrik Sutera, Pesisir Selatan Sumatera Barat. Program PEMP diciptakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kehidupan penduduk di kawasan pesisir Sumatera Barat. Kajian kualitatif memperlihatkan bahwa rencana mikrokredit dan pinjaman mesin boat dalam cakupan PEMP tidak sejalan dengan konsep yang semula direncanakan. Hal ini disebabkan permasalahan kultural, seperti kemalasan, gaya hidup yang tidak produktif, tidak efisien, rendahnya tingkat pendidikan, ketergantungan pada tengkulak, serta rendahnya kompetensi penguasaan teknologi mesin-mesin perikanan.

Kata Kunci: Village, PEMP Programs, Loans, Government, Fishermen Workers

I. PENDAHULUAN

Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi yang berada di pesisir Barat pulau Sumatera yang memiliki potensi penangkapan dan pengelolaan ikan di laut yang sangat besar. Hal ini didukung oleh pantai sepanjang 375 km, yang dimulai dari Kabupaten Pasaman Barat di utara sampai Kabupaten Pesisir Selatan di selatan, serta 2.420 km jika termasuk pantai di Kepulauan Mentawai.

Namun, dengan realitas sosial yang ada saat ini, tidak kurang 1/3 daerah yang terletak di daerah pesisir, yang berada di daerah pesisir terutama di wilayah pantai Barat Sumatera dikategorikan sebagai daerah yang memiliki penduduk miskin dibandingkan dengan penduduk petani di daerah daratan (<http://pemprov-sumbar.go.id>: diakses tanggal 15 Nopember 2010).

Daerah pesisir pantai Barat Sumatera adalah

kantong-kantong kemiskinan struktural yang potensial. Kesulitan mengatasi masalah kemiskinan di daerah pesisir telah menjadikan penduduk di kawasan ini harus menanggung beban kehidupan yang tidak dapat dipastikan masa berakhirnya. Kerawanan di bidang sosial-ekonomi dapat menjadi lahan subur bagi timbulnya kerawanan-kerawanan di bidang kehidupan yang lain.

Sejak krisis mulai merambah ke berbagai wilayah pertengahan tahun 1997, nelayan tradisional boleh dikata adalah kelompok masyarakat pesisir yang paling menderita dan merupakan korban pertama dari perubahan situasi sosial-ekonomi yang terkesan tiba-tiba, namun berkepanjangan. Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan nelayan tradisional untuk bertahan dan melangsungkan kehidupannya, jika dari hari ke hari potensi ikan di laut makin langka karena cara penangkapan yang berlebihan?

Dengan hanya mengandalkan pada perahu

¹ Artikel ini merupakan hasil penelitian Dosen Muda 2010, yang didanai oleh DIPA Universitas Andalas.

² Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas, Padang, Gedung Jurusan Lantai I FISIP Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, Email: hafidz_smartillah@yahoo.com

tradisional dan alat tangkap ikan yang sederhana, jelas para nelayan tradisional ini tidak akan pernah mampu bersaing dengan nelayan modern yang didukung perangkat yang serba canggih dan kapal besar yang memiliki daya jangkau yang jauh lebih luas (Suyanto, 2003; Kusnadi, 2002).

Berdasarkan klasifikasi Masyuri dalam Zamzami (2009:39), ciri-ciri nelayan buruh atau dikatakan nelayan tradisional ditandai dengan (a) kegiatan mereka yang lebih banyak menggunakan padat, walaupun menggunakan mesin, ukuran atau tenaga mesin relatif kecil atau motor tempel dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana; (b) teknologi yang dipakai untuk penangkapan atau pengolahan ikan yang masih sederhana dan (c) tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Ciri-ciri tersebut di atas dibuktikan dengan peralatan penangkapan ikan yang sederhana seperti perahu (biduak) yang memakai mesin tempel, alat pancing/jala, sehingga hasilnya sangat berbeda jauh dengan peralatan nelayan modern.

Berbagai kajian mengenai kehidupan nelayan umumnya menekankan pada kemiskinan dan ketidakpastian perekonomian, karena kesulitan hidup yang dihadapi nelayan dan keluarganya (Acheson, 1981, Emerson, 1980).

Kehidupan nelayan dapat dikatakan tidak saja belum berkecukupan, melainkan juga masih terbelakang, termasuk dalam hal pendidikan. Keterbatasan sosial yang dialami nelayan memang tidak terwujud dalam bentuk keterasingan, karena secara fisik masyarakat nelayan tidak dapat dikatakan terisolasi atau terasing. Namun, lebih terwujud pada ketidakmampuan mereka dalam mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar secara menguntungkan, yang ditunjukkan oleh lemahnya mereka mengembangkan organisasi keluar lingkungan kerabat mereka atau komunitas lokal (Boedhisantoso, 1999).

Kondisi keterbatasan sosial dan kemiskinan yang diderita masyarakat nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan modal, kurangnya akses, dan jaringan perdagangan ikan yang cenderung eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, serta dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terkurasnya sumber daya laut secara cepat dan berlebihan, serta terbatasnya peluang dan kesempatan nelayan untuk melakukan diversifikasi pekerjaan, terutama di luar kegiatan pencarian ikan di laut (Sri Haryono, 2005: 119-120).

Dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi nelayan tradisional tersebut, maka pemerintah mencanangkan suatu program yang diupayakan dapat langsung menyentuh kepentingan masyarakat nelayan, terutama nelayan buruh yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi.

Di samping untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, juga bertujuan untuk mendidik agar nelayan lebih mandiri dan mempunyai kemampuan untuk hidup lebih baik dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dan berkelanjutan. Melalui program pemerintah, terutama program pemberdayaan, tetap memerhatikan sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lokal, sehingga program yang ada tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan sumber daya laut dan daerah pesisir (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001: 6-7).

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut, maka peran pemerintah harus dilaksanakan dengan suatu *platform* strategis. Komitmen pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat miskin dapat dilaksanakan terus menerus hanya berdasarkan kebijakan yang bersifat *emergency treatment* (Dahuri, 1999: 2).

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah melalui Departemen Perikanan dan Kelautan telah membuat suatu program pemberdayaan kepada masyarakat pesisir, terutama nelayan buruh yang dinamakan dengan PEMP (Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir).

Sebelum program PEMP dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan pada masyarakat nelayan, pemerintah telah berusaha melakukan berbagai macam program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Pada tahun 1980, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1980 tentang pemberian kredit kepada nelayan dalam bentuk program KIK, KMPK dan kredit BIMAS melalui bank BRI (Fitrisia, 1996: 23).

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melibatkan masyarakat pesisir dalam setiap tahapan kegiatannya.

Program PEMP pertama kali dilaksanakan pada tahun 2000 di 26 Kabupaten pada 7 propinsi, yaitu Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Untuk tahun anggaran 2001, pelaksanaan program PEMP diperluas menjadi 125 Kabupaten/Kota di 30 propinsi yang ada di Indonesia (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001: 12).

Program PEMP yang dilaksanakan di propinsi Sumatera Barat sendiri dilaksanakan pada tahun 2001 di 4 Kabupaten/Kota, yaitu Pesisir Selatan, Pasaman, Padang Pariaman dan Kota Padang. Untuk pelaksanaan PEMP tahun 2001 di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan di 3 (tiga) nagari yang terdapat di Kecamatan Ranah Pesisir, yaitu kampung Nyiur Melambai, kampung Pasir Palangai dan

kampung Pasir Harapan.

Setiap lokasi yang dijadikan sasaran program PEMP dibentuk kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP), yang nantinya akan memperoleh bantuan dari program tersebut. Pada kampung Nyiur Melambai, dibentuk KPM Mercusuar dengan anggota 36 orang, kampung Pasir Palangai dibentuk KMP Bandar Baru dengan anggota 35 orang dan kampung Pasir Harapan dibentuk KMP Harapan Jaya dengan anggota 42 orang (Armansyah, 2008: 8-9).

Untuk tahun anggaran 2002, Kabupaten Pesisir Selatan kembali menjadi lokasi sasaran dari program PEMP. Pada tahun anggaran tersebut, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan menunjuk 4 kecamatan sebagai lokasi sasaran PEMP, yaitu Kecamatan Sutera, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Setelah lokasi kecamatan ditentukan, maka selanjutnya tiap-tiap kecamatan melaksanakan musyawarah untuk menentukan nagari dan kampung yang menjadi sasaran PEMP. Untuk Kecamatan Sutera adalah kampung Ampiang Perak, Kecamatan IV Jurai adalah kampung Painan Selatan, Kecamatan Lengayang adalah kampung Lakitan dan Kecamatan Linggo Sari Baganti adalah nagari Punggasan.

Disamping itu, didirikan pula suatu lembaga ekonomi yang mengurus kelanjutan perguliran dana bagi masyarakat, yaitu Lembaga Pengembangan Pesisir Makro Mitra Mina (LEPP M3). Lembaga ini secara struktural berada di atas KMP, dengan pengurus dari masing-masing lembaga yang dipilih dari anggota masyarakat.

Lokasi sasaran PEMP yang telah dijadikan sebagai lokasi penelitian ini adalah berada di kampung Ampiang Perak, Kecamatan Sutera. Berdasarkan kepada pola mata pencaharian masyarakat di lokasi ini bahwa yang bekerja sebagai nelayan memiliki prosentase cukup tinggi, yaitu 60%, diikuti petani (sawah dan kebun) sekitar 30% dan lain-lain (10%). Sebagian besar pekerjaan nelayan didominasi oleh para nelayan buruh yang memiliki pendapatan rendah, yaitu berkisar antara Rp.10.000,- hingga Rp.30.000,- per harinya.

Sejak digulirkan tahun 2000 sampai dengan 2009, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah menjangkau 293 kabupaten/kota pesisir di seluruh Indonesia.

Secara umum, program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan budaya kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumber daya lokal dan dilaksanakan berkelanjutan (Kusnadi, 2009:63)

Program PEMP merupakan program yang

dijalankan pemerintah sejak tahun 2001 untuk daerah provinsi Sumatera Barat, dimana pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dalam proses pelaksanaannya program ini tentu tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi. Sebagai suatu program yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dalam proses pelaksanaannya dibentuk beberapa organisasi sebagai wadah untuk pengembangannya, seperti didirikannya Lembaga EkonoMo Pengembangan Pesisir "Mikro Mitra Mina" (LEPP M3) dan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP). Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana proses pelaksanaannya dari awal sehingga dapat mengetahui apa inti dari program PEMP tersebut.

Maka itu, panulis mencoba mengesplorasi program PEMP dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pembentukan sehingga proses pelaksanaan di masyarakat sehingga kita dapat melihat implementasinya terhadap masyarakat.

Dari uraian permasalahan tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana bentuk program PEMP dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di Kampung Ampiang Perak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dan apa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program PEMP sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan terutama nelayan buruh.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menguraikan proses dari program PEMP yang dijalankan pemerintah selama ini Kampung Ampiang Perak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan; (2) Menganalisis faktor-faktor penghambat dalam menjalankan program PEMP selama pelaksanaannya pada masyarakat Kampung Ampiang Perak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan memperoleh gambaran tentang kondisi aktual proses pelaksanaan program PEMP diharapkan dapat bermanfaat memberikan wacana yang baru bagi pemerintah dalam perencanaan program kepada masyarakat dengan lebih memerhatikan dan mempertimbangkan arah perencanaan yang lebih baik lagi, sehingga program-program yang ada benar-benar berdampak positif kepada masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk melahirkan rekomendasi yang membantu pemahaman bagi perumusan kebijaksanaan pembangunan, khususnya program-program yang berkaitan dengan pembangunan potensi keluarga nelayan buruh dalam rangka peningkatan kesejahteraan, baik sosial maupun ekonomi.

Penelitian dilakukan di Nagari Ampiang Perak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat. Alasan pemilihan lokasi

penelitian adalah Nagari Ampiang Perak merupakan nagari yang paling banyak penduduknya (60%) yang bekerja sebagai nelayan buruh dan sebagian besar rumah tangga nelayan buruh di nagari tersebut dikategorikan ke dalam rumah tangga miskin dan memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi yang tersedia di lingkungannya. Selain itu, daerah ini merupakan salah satu nagari penerima program PEMP pada tahun 2006-2008. Hal ini akan menjelaskan kepada pencapaian tujuan penelitian, yaitu untuk melihat pelaksanaan program PEMP tersebut dan menjelaskan secara rinci mengenai kendala-kendala pelaksanaan program PEMP tersebut di tengah-tengah masyarakat nelayan, terutama rumah tangga buruh nelayan.

Penelitian ini bertipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati dari lingkungan yang alamiah (Moleong, 1991:3).

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mendetail tentang proses pelaksanaan program PEMP sebagai upaya meningkatkan taraf hidup rumah tangga nelayan buruh. Selain itu, juga menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program PEMP terhadap rumah tangga nelayan buruh di Nagari Ampiang Perak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam menggunakan metode ini, peneliti mendapatkan data deskripsi dari latar belakang yang terjadi terhadap rumah tangga masyarakat nelayan buruh berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan serta aspek-aspek penting lainnya yang terkait dengan penelitian.

Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah dengan cara *purposif* (sengaja), yaitu menentukan informan berdasarkan atas tujuan penelitian. Adapun kriteria yang ditetapkan untuk memilih informan adalah: (1) Masyarakat nelayan khususnya para nelayan buruh; (2) Mengikuti tahapan kegiatan pelaksanaan program PEMP, sehingga dianggap mengetahui awal mulanya program PEMP di Nagari Ampiang Perak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan; (3) Mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam program PEMP; (4) Memiliki kemampuan memberikan informasi tentang program PEMP; dan (5) Mampu memberikan keterangan mengenai informasi lain yang berhubungan dengan program PEMP.

Oleh karena itu, yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan program, yaitu dari pemerintah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, perangkat LEPP M3, tokoh-tokoh masyarakat seperti wali kampung dan mantan wali kampung yang

pernah terlibat dalam kepengurusan program PEMP dan anggota KMP.

Adapun yang menjadi informan penelitian dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebanyak 2 orang, pihak LEPP M3 sebanyak 1 orang, tokoh masyarakat sebanyak 2 orang, dan anggota KMP yang berjumlah 52 orang, yang dijadikan sebagai informan untuk studi kualitatif adalah sebanyak 15 orang dengan teknik *purposive* adalah (1) anggota KMP yang berhasil melunasi pembayaran kredit; (2) anggota KMP yang ditarik bantuannya karena melakukan tunggakan dalam jangka waktu tiga bulan berturut-turut; (3) anggota KMP yang menunggak pembayaran, namun tidak sampai ada penarikan.

Teknik analisa data terhadap data yang diperoleh di lapangan yang didapat melalui pengamatan dan wawancara di kumpulkan, dipelajari dan di klasifikasikan menurut temanya masing-masing. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sejak awal penelitian, yaitu pada saat merumuskan permasalahan sampai pada pelaporan hasil penelitian sehingga laporan tersebut akan bersifat deskriptif berupa uraian tentang bagaimana proses yang dijalankan pemerintah dalam program PEMP, kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dan hasil dari adanya program tersebut.

II. PEMBAHASAN

Masyarakat pesisir yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya yang kehidupan sosial-ekonominya tergantung pada sumber daya kelautan, merupakan segmen anak bangsa yang pada umumnya masih tergolong miskin. Ketertinggalan masyarakat pesisir selain terbatasnya dalam mengakses sumber permodalan dan lemahnya infrastruktur kelembagaan sosial ekonomi masyarakat di tingkat desa. Kondisi seperti ini membuat masyarakat pesisir semakin tertinggal (Mubyarto, 1984).

Nelayan dan komunitas desa pesisir, pada umumnya adalah bagian dari kelompok masyarakat miskin yang berada pada *level* paling bawah dan acapkali menjadi korban pertama yang paling menderita akibat ketidakberdayaan dan kerentanannya. Berbagai kajian yang telah dilakukan menemukan, bahwa para nelayan (tradisional) bukan saja sehari-hari harus berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang panjang, tetapi lebih dari itu mereka juga sering harus berhadapan dengan berbagai tekanan dan bentuk eksploitasi yang muncul bersamaan dengan berkembangnya proses modernisasi di sektor perikanan (Satria, 2002; Yustika, 2003)

Dengan latar belakang kemiskinan masyarakat nelayan yang selalu mendera, maka

pemerintah perlu mengeluarkan program inovasi agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan.

Salah satu program pemberdayaan tersebut adalah program Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Konsistensi kebijakan program PEMP merupakan salah satu unsur penting yang menunjang pelaksanaan program pemberdayaan di kawasan pesisir. Program PEMP yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan dan mengembangkan dinamika ekonomi kawasan pesisir dirancang untuk mencapai pendekatan kelembagaan (Miraza, 2009).

Dalam program PEMP terdapat strategi pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan. Hal tersebut dapat ditempuh dengan mengembangkan dua model beserta variasinya. *Pertama*, model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis pranata budaya atau kelembagaan sosial. *Kedua*, model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis gender. Kedua model juga bisa disinergikan dan didukung dengan program-program terkait. Pilihan terhadap salah satu model tersebut dalam pemberdayaan masyarakat pesisir akan dipengaruhi oleh tujuan pemberdayaan, unsur-unsur yang terlibat dan kondisi-kondisi lingkungan sekitar (Suharto, 2005).

Salah satu wilayah yang memperoleh program PEMP di propinsi Sumatera Barat adalah di Nagari Ampiang Perak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan profil isian data monografi Nagari (2009), bahwa nagari Ampiang Perak sendiri merupakan salah satu di antara nagari-nagari yang terdapat di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Ampiang Perak terletak di wilayah pesisir yang merupakan kawasan pantai, sehingga dapat dikatakan kenagarian Ampiang Perak yang di dalamnya terdapat kampung-kampung yang digolongkan sebagai wilayah pantai. Luas wilayah Nagari Ampiang Perak mencapai 2.800 Ha, memiliki batas teritorial: sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Kambang, sebelah Utara berbatasan dengan nagari Surantih dan sebelah Timur berbatasan dengan nagari Amping Perak Timur.

Nagari Ampiang Perak memiliki kesejarahan yang cukup dinamis, bukan hanya dari masa pra kemerdekaan saja ketika masih berjayanya Kesultanan Amping Parak (masa Sutan Jamak) yang menurut sejarah awalnya bernama Payung Perak atau nama lainnya Hamparan Perak yang berinduk ke Kerajaan Indrapura yang berkuasa di sebelah Utara Nagari Ampiang Perak dan secara umum menguasai sebagian besar Pesisir Selatan Sumatera Barat (<http://www.urangminang.com>: diakses tanggal 10 Nopember 2010)

Menurut *Profil Isian Data Monografi Nagari* (2009), secara keseluruhan, wilayah Nagari Ampiang Perak beriklim tropis dengan hawa sedang

dengan memiliki curah hujan cukup tinggi antara 2.500 sampai 20.000 mm/tahun. Suhu udara berkisar antara 18-23 derajat selsius. Topografi Nagari Ampiang Perak berupa daerah daratan, gunung dan bukit yang merupakan gugusan bukit barisan yang letaknya di sepanjang garis pantai. Di Nagari Ampiang Perak, terutama di 4 (empat) kampung, yaitu kampung Alai, kampung Pasar Hamparan Perak, kampung Padang Tae, dan kampung Ujung Air yang terletak di sepanjang pesisir pantai, sebagian besar nelayan yang berdomisili merupakan nelayan buruh.

Berdasarkan data kependudukan Nagari Ampiang Perak tahun 2009, jumlah penduduk sebanyak 8.023 jiwa orang, dengan penduduk laki-laki berjumlah 3.955 jiwa dan penduduk perempuan 4.068 jiwa orang. Jumlah kepala keluarga (KK) adalah 1.741. Selain itu, jumlah penduduk miskin di wilayah Nagari Ampiang Perak berjumlah 559 KK (31.10%) dan penduduk menengah ke atas berjumlah 1.182 (68.90%) (Profil Isian Data Monografi Nagari, 2009).

Sebagian besar penduduk di Nagari Ampiang Perak bermata pencarian sebagai nelayan, terutama nelayan buruh sebanyak 1.637 (33%) dibandingkan dengan yang lainnya. Salah satu penyebabnya adalah kondisi wilayah Nagari Ampiang Perak yang terletak memanjang di garis pantai daerah Pesisir Selatan yang terdapat di 4 kampung, yaitu kampung Alai, kampung Pasar Hamparan Perak, kampung Padang Tae dan kampung Ujung Air. Selain mata pencarian nelayan, mata pencarian terbesar kedua adalah dari segi pertanian yang terletak di 2 (dua) kampung di Nagari Ampiang Perak, yaitu Kampung Padang Laweh dan Koto Tarok.

Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan buruh di Nagari Ampiang Perak hampir sama dengan aktivitas penangkapan ikan lainnya di berbagai daerah di wilayah Pesisir Selatan. Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan buruh di wilayah pesisir pantai Selatan Sumatera Barat adalah *membagan, memayang, memukat, menjaring dan memancing* (Zamzami, 2009: 76-78).

Kesadaran masyarakat di Nagari Ampiang Perak terhadap pentingnya pendidikan, cukup tinggi, di mana sebagian besar masyarakatnya sudah mengenyam pendidikan pada tingkat SMP dan SMA. Meskipun demikian, sebagian masyarakatnya juga ada yang menamatkan pendidikan hanya pada tingkat SD, bahkan tingkat pendidikan di Nagari Ampiang Perak cukup tinggi. Hal tersebut diperlihatkan melalui jumlah penduduk yang telah menamatkan pendidikan SMP dan SMA sebanyak 2.030 (54%). Meskipun demikian, diperoleh juga terdapat penduduk yang tidak menamatkan pendidikan SD (18%).

Pada umumnya, mereka yang tidak menamatkan pendidikan SD dikarenakan faktor

ekonomi dan kesempatan. Untuk jumlah sarana pendidikan di Nagari Ampiang Perak cukup memadai dengan tersedianya sarana pendidikan SMP dan SMA. Hal tersebut diperlihatkan dari tingkat pendidikan yang cukup tinggi dengan tingkat pendidikan SMP dan SMA.

Pola pemukiman Nagari Ampiang Perak yang mengikuti garis pantai, dimulai dari kampung Alai, kemudian dilanjutkan menuju kampung Pasar Hamparan Perak, kampung Padang Tae, kampung Ujung Air. Untuk 2 kampung lainnya berada di sepanjang perbukitan yang berada di seberang garis pantai, yaitu kampung Padang Laweh dan kampung Koto Tarok. Untuk menuju Nagari Ampiang Perak, dapat ditempuh dengan kendaraan beroda dua dan empat dengan sarana jalan yang cukup baik sehingga dapat ditempuh selama 1.5 jam perjalanan dari ibu kota Pesisir Selatan yaitu kota Painan.

Salah satu faktor penting dalam aktivitas nelayan buruh di Nagari Ampiang Perak adalah menjual hasil penangkapan ikan. Hasil produksi berupa ikan yang telah ditangkap di laut oleh nelayan buruh merupakan produksi ikan yang cepat rusak sehingga harus segera dipasarkan. Kondisi ini menyebabkan para nelayan buruh menjual hasil tangkapannya secepatnya setelah berlabuh di tepi pantai. Biasanya, hasil tangkapan para nelayan buruh akan langsung dijual di pinggir pantai, di mana di tempat tersebut telah menunggu para pedagang (toke') dan juga pengolah ikan untuk membeli hasil tangkapan mereka. Dalam proses penjualan ikan tersebut, nelayan buruh langsung berhubungan dengan para pedagang atau pengolah ikan tanpa ada perantara.

Harga ikan yang dijual oleh nelayan buruh di Nagari Ampiang Perak bervariasi, sesuai dengan jenis ikan yang ditangkap, yaitu ikan Bulato (ikan Kembung) 1 kg seharga Rp. 13.000,-, ikan Gabua 1 kg seharga Rp. 15.000,-, ikan Kaliang-kaliang 1 kg seharga Rp. 7.000,-, ikan Tongkol 1 kg seharga Rp. 10.000,-, ikan Tambolo 1 kg seharga Rp. 14.000,-, ikan Bowl putih 1 kg seharga Rp.40.000,-, ikan Bowl hitam 1 kg seharga Rp.20.000,-, ikan Tenggiri Aceh 1 kg seharga Rp. 20.000,- dan ada juga terdapat pengolahan *bada teri* (ikan teri), namun jarang karena ikan teri lumayan sulit didapat.

Untuk aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan nelayan buruh di Nagari Ampiang Perak, terdapat beberapa perahu yang digunakan dalam mencari ikan, yaitu: (1) Kapal *Bagan*, kapal yang cukup besar menggunakan mesin sebagai penggerak kapal, dan memiliki lampu sebagai penarik ikan. Biasanya, kapal *bagan* dapat ditemukan di daerah Suranti; (2) Kapal *Tondo* atau kapal boat, yaitu kapal dengan mesin disel seperti boat; (3) *Pompong*, kapal yang menggunakan tenda; (4) *Payang*, yaitu biduak atau perahu bercadik; (5) *Robin*, yaitu perahu dengan

menggunakan mesin robin atau mesin tempel seperti speedboat. Biasanya hanya untuk 2 orang; dan (6) *Sampan Boling* yaitu sampan biasa dengan menggunakan dayung saja.

Untuk aktivitas penangkapan ikan di Nagari Ampiang Perak, terdapat hari di mana para nelayan buruh tidak diperbolehkan melaut, yaitu pada hari Jumat. Pada hari Jumat tersebut para buruh nelayan hanya fokus beribadah (salat Jumat), terutama bagi yang laki-laki di mana kalau ada yang melanggar, maka nelayan buruh yang melakukan akan mendapatkan sanksi sosial seperti cemoohan dari masyarakat. Kemudian saat ada kematian, buruh nelayan harus melayat ke rumah jenazah dan mengikuti proses-proses upacara kematian sebagai penghormatan kepada orang yang sudah meninggal.

Biasanya, para nelayan buruh di Nagari Ampiang Perak ketika ke laut dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 06.30 Wib.

Kemudian kembali pada pukul 16.00 Wib. Kegiatan tersebut dikatakan tidak menentu di mana tergantung kepada hasil tangkapan ikan.

Untuk melakukan penangkapan ikan pada malam hari, tidak banyak dilakukan oleh para nelayan buruh, dikarenakan kondisi fisik nelayan buruh dan penggunaan perahu sebatas payang dan perahu tanpa mesin.

Hasil tangkapan ikan tidak menentu setiap harinya, bahkan tidak mendapatkan ikan sama sekali. Untuk hasil dari memukat, hasil tangkapan ikan bisa mencapai lebih dari 3 ton sehari dan untuk memancing akan mendapatkan lebih kurang 100 kg dengan menggunakan perahu boling atau perahu robin.

Ikan hasil tangkapan di laut biasanya langsung dijual kepada pedagang ikan (toke') di gudang ikan. Di kampung Alai sendiri tidak memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI), karena TPI hanya dijumpai di daerah Surantih dan Kambang. Penawaran dalam penjualan ikan cukup adil. Jika nelayan buruh tidak mau menjual ikan dengan toke', biasanya ikan akan dijual sendiri ke pasar di Surantih atau Pasar Rabu yang hanya ada di hari rabu hingga pukul 11 siang.

Di empat kampung, yaitu kampung Alai, kampung Pasar Hamparan Perak, kampung Padang Tae, dan kampung Ujung Air yang terletak di sepanjang pesisir pantai Nagari Ampiang Perak, para nelayan buruh melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut, dimulai dari subuh, yaitu sekitar pukul 4-5 Wib, dimana menurut para informan, pada waktu tersebut jumlah ikan lebih banyak. Aktivitas penangkapan ikan akan berhenti ketika sudah menjelang sore hari, yaitu pada pukul 5 sore dan lebih cepat apabila cuaca buruk mulai muncul.

Gambaran Program PEMP di Nagari Ampiang Perak. Berdasarkan hasil identifikasi lokasi yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di

wilayah kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan 4 (empat) kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan PEMP untuk tahun 2002, yaitu:

- (1) Kecamatan IV Jurai
- (2) Kecamatan Sutera
- (3) Kecamatan Lengayang
- (4) Kecamatan Linggosari Baganti.

Alasan dipilihnya 4 (empat) lokasi kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain, (1) program bidang perikanan tahun anggaran 2020 belum teralokasikan, pada tahun; (2) pada tahun sebelumnya merupakan kecamatan yang belum mendapatkan alokasi program perikanan; (3) merupakan kecamatan pengembangan sentra penangkapan ikan; dan (4) masyarakat pesisirnya lebih banyak bertempat tinggal di sepanjang pantai.

Untuk penentuan lokasi nagari di setiap kecamatan didasarkan pada karakteristik sasaran program PEMP, dengan indikator nelayan buruh yang memiliki kemauan dan keinginan untuk mengembangkan usaha, nelayan skala kecil (motor tempel), petani budidaya ikan skala kecil dan buruh tambak, pengolah ikan tradisional, pedagang ikan setempat dan pelaku ekonomi skala kecil lainnya yang berusaha di daerah pesisir. Penetapannya diputuskan dalam musyawarah yang dihadiri kepala cabang dinas sebagai ketua tim identifikasi, camat dan pimpagpro PEMP. Pada Kecamatan Sutera, khususnya di Nagari Ampiang Perak, terdapat 4 (empat) kampung yang terletak di sepanjang pantai, yaitu kampung Alai, kampung Pasar Hampan Perak, kampung Padang Tae dan kampung Ujung Air.

Penduduk terpadat berada di kampung Alai dengan jumlah 1.385 jiwa dengan 560 KK. Dari jumlah tersebut, konsentrasi KK miskin terbanyak berada di kampung ini dengan 228 KK, yang sebagian besar adalah nelayan buruh. Untuk peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, terutama nelayan buruh, pemerintah memberikan bantuan modal perikanan (perahu/mesin) dan modal di luar perikanan (modal usaha). Adapun jenis bantuan yang diterima oleh anggota KMP melalui program PEMP terdiri atas pengadaan mesin tempel dan modal usaha. Proses pencarian dana program PEMP di Nagari Ampiang Perak adalah dana dari KPKN yang diturunkan ke LEPP-M3 melalui rekening Bank Nagari Cabang Painan. KMP mengajukan permintaan penyediaan dana kepada LEPP-M3 sesuai dengan prioritas usulan kenis kegiatan dan jumlah dana yang disepakati dalam musyawarah.

LEPP-M3 yang dikuasakan mencairkan dana di Bank Nagari Cabang Painan atas nama rekening PEMP 2002 LEPP-M3 dengan pengawasan dari Pimbagpro PEMP dan selanjutnya LEPP-M3 menyalurkan dana kepada rekening masing-masing KMP. Sebelum bantuan diterima terlebih dahulu anggota PEMP mengisi format kelengkapan pinjaman berupa surat perjanjian kerjasama pinjaman dana

ekonomi produktif bagi anggota KMP dan pengurus. Perjanjian kerjasama yang berisi persetujuan antara anggota KMP dengan pengurus KMP bahwa pihak pengurus menyetujui pembayaran pinjaman kepada anggota dan anggota KMP sanggup menerima pinjaman ditambah dengan bunga. Apabila anggota KMP melanggar perjanjian akan dikenakan sanksi dan tidak boleh meminjam lagi.

Program PEMP yang dilaksanakan di nagari Ampiang Perak tersebut bisa dikatakan sebagai suatu program usaha perikanan terpadu, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keterpaduan juga terwujud dalam hal kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan masyarakat yang memang tidak terfokus pada kegiatan tertentu, namun tersebar ke dalam kelompok kegiatan yang saling terkait. Demikian pula keterpaduan diwujudkan melalui pelibatan *stakeholder* yang berasal dari berbagai pihak, instansi pemerintah, masyarakat dan swasta.

Visi program PEMP yang dijalankan di nagari Ampiang Perak adalah menjadi program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan laut secara lestari. Maksudnya adalah program ini merupakan program yang disiapkan dan disusun sedemikian rupa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat miskin dan menggunakan sumber daya alam. Dalam hal ini sumber daya pesisir dan laut yang ada sebagai modal yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan menjaga tetap lestari sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan (Armansyah, 2008).

Adapun yang menjadi misi dari program PEMP adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat pesisir.
- (2) Mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut secara optimal, lestari, dan berkelanjutan.
- (3) Mengembangkan kemitraan dengan lembaga swasta dan pemerintah (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001).

Secara umum, program PEMP bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, penguatan kelembagaan sosial ekonomi, dan partisipasi masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan.

Program PEMP yang dilaksanakan di nagari Ampiang Perak memiliki 4 kegiatan utama, yaitu: (1) pengembangan lembaga keuangan mikro di tingkat masyarakat yang bernama lembaga Mikro Mitra Mina

(M3). Lembaga ini pada awalnya adalah lembaga informal yang didirikan sendiri oleh masyarakat serta dijalankan atau diorganisir oleh mereka sendiri; (2) pengembangan usaha ekonomi produktif oleh kelompok pemanfaat yang merupakan kelompok-kelompok kecil yang memiliki kesamaan usaha, aspirasi, dan tujuan. Kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan, tentu saja, berdasarkan atas potensi sumberdaya alam yang tersedia, peluang pasar, kemampuan dan penguasaan teknologi oleh masyarakat, serta dukungan adat dan budaya. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi produktif meliputi usaha budidaya ikan, penangkapan ikan, pengolahan ikan, pemasaran ikan, serta usaha jasa yang mendukung seperti perbengkelan atau penyediaan sarana produksi lainnya; (3) pelatihan dan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat lokal. Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat menjalankan program yang dilaksanakan. Agenda pelatihan lebih banyak bermuatan nonteknis seperti peningkatan motivasi, kerjasama kelompok, serta bagaimana merumuskan masalah dan menyampaikan pendapat secara tertulis maupun tidak tertulis; (4) pengembangan model pemberdayaan pasca program yang diarahkan pada pengembangan jaringan usaha antara masyarakat sasaran dengan kelompok lain, LSM, swasta, serta pemerintah daerah.

A. Proses Pelaksanaan Program PEMP

Program PEMP sebagai suatu program inovasi dalam usaha mengentaskan kemiskinan. Meskipun telah ada program lainnya dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut, misalnya program IDT, kredit BIMAS, KIK, KMPK. Program PEMP adalah program pembangunan untuk masyarakat yang bersifat pembangunan partisipatif dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Pembangunan partisipatif adalah suatu cara yang dilakukan oleh *stakeholders*, di mana dalam proses perencanaan dalam pembentukan suatu kebijakan yang *output* nya berupa suatu program, melibatkan masyarakat yang merupakan sasaran dari kebijakan yang akan dikeluarkan. Secara umum nantinya kebijakan yang akan diambil dari keikutsertaan masyarakat tadi harus bisa membuat masyarakat itu lebih maju dan mandiri dalam meningkatkan taraf kehidupan, baik sosial maupun ekonomi.

Dalam pembangunan partisipatif, pemerintah mempunyai posisi sebagai fasilitator dari apa yang direncanakan oleh masyarakat itu sendiri dan mendukung penuh baik berupa pemikiran maupun menyiapkan materi serta membina masyarakat agar perencanaan yang telah disepakati bersama tadi bisa berjalan dengan semestinya, sehingga membentuk sosial ekonomi masyarakat yang tangguh dan berkesinambungan. Oleh karena itu, program PEMP dalam proses pembentukannya mengikutsertakan masyarakat. Pembentukan program PEMP melalui partisipasi masyarakat tersebut berupa musyawarah

yang dilakukan oleh perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari masyarakat yang diwakili oleh perangkat nagari, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat nelayan buruh.

Oleh karena itu, program PEMP dalam proses pembentukannya mengikutsertakan masyarakat. Pembentukan program PEMP melalui partisipasi masyarakat di nagari Ampiang Perak, Kecamatan Sutra tersebut berupa musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari masyarakat yang diwakili oleh perangkat nagari, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat nelayan buruh.

Musyawarah tersebut dilakukan sebanyak 4 kali dengan pencapaian tujuan sebagai berikut:

- (1) *Musyawarah 1.* Dalam musyawarah pertama ini yang dilakukan adalah pemilihan lokasi di mana program PEMP akan dijalankan. Pada tingkat kecamatan diprakarsai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan camat pada kecamatan yang terpilih dan selanjutnya dipilih nagari pada masing-masing kecamatan terpilih. Dalam musyawarah pertama ini dilakukan program tingkat nagari dan pembentukan mitra nagari, sehingga dapat membentuk komunikasi yang baik antara fasilitator dengan masyarakat. Pengurus mitra nagari sedikitnya terdiri atas ketua dan sekretaris yang disahkan oleh wali kampung. Pengurus mitra nagari adalah orang yang berasal dari nagari yang menjadi sasaran dari program PEMP yang difasilitasi oleh Departemen kelautan dan Perikanan Pesisir Selatan.
- (2) *Musyawarah 2.* Dalam musyawarah kedua ini dilakukan pemilihan pengurus Kelompok Masyarakat Penerima (KMP) pada masing-masing nagari. Tim teknis bersama mitra nagari membentuk KMP yang nantinya akan melaksanakan dan mengembangkan usaha ekonomi produktif di nagari masing-masing. Pembentukan pengurus KMP untuk mempermudah pelaksanaan PEMP dan melakukan verifikasi bantuan yang diterima anggota KMP. Pada musyawarah kedua tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah pemilihan pengurus KMP yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara, juga sosialisasi mengenai pelaksanaan program, pendanaan, pelaporan, dan penyusunan rencana tindak lanjut.
- (3) *Musyawarah 3.* Setelah pengurus KMP terpilih, maka dibentuklah pengurus LEPP-M3 melalui musyawarah kabupaten. LEPP-M3 merupakan lembaga ekonomi daerah yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Pesisir Selatan. Pengurus LEPP-M3 terdiri atas perwakilan pengurus KMP yang menjadi sasaran dari program PEMP. Dalam implementasinya,

pembentukan pengurus LEPP-M3 dihadiri oleh pengurus-pengurus KMP yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, pengurus mitra nagari, tim teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pimbagpro PEMP.

- (4) *Musyawarah 4*. Sebelum dilakukan penetapan anggota KPM, terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap calon anggota KMP. Verifikasi mulai dilakukan pada musyawarah keempat yang mencakup tempat tinggal, jenis usaha dan keluarga calon anggota KMP. Sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada anggota KMP jika melakukan tunggakan terhadap pembayaran kredit berupa teguran pertama yang disampaikan oleh pengurus KMP apabila anggota tidak memenuhi kewajibannya membayar cicilan bulanan. Teguran kedua disampaikan oleh pengurus KMP disertai penarikan jaminan anggota apabila tidak memenuhi cicilan pada bulan kedua. Teguran ketiga disampaikan oleh pengurus KMP disertai pengalihan jaminan anggota kepada pihak pemberi bantuan (LEPP-M3), apabila tidak memenuhi cicilan pada bulan ketiga. Berdasarkan hasil musyawarah keempat ini diputuskan bahwa setiap calon anggota harus menyerahkan identitas diri berupa fotokopi KTP. Dari musyawarah tersebut diharapkan calon anggota dapat memahami sanksi apa yang akan dia terima nantinya jika terjadi penunggakan terhadap pembayaran kredit. Untuk selanjutnya, bagi calon anggota harus menyediakan jaminan yang akan diberikan untuk mendapatkan bantuan dari PEMP. Jaminan yang harus diserahkan oleh calon anggota KMP disesuaikan dengan jenis pinjaman yang akan diterima. Bagi yang ingin mendapatkan mesin harus menjaminkan perahunya dan yang ingin meminjam modal untuk usahanya, maka jaminannya berupa TV, VCD, dan kendaraan bermotor.
- (5) *Musyawarah 5*. Setelah musyawarah 4 selesai dilakukan untuk selanjutnya dilaksanakan musyawarah ke-5. Pada musyawarah ini akan dilakukan penetapan anggota KMP dengan melakukan verifikasi terhadap calon anggota KMP. Verifikasi ini dilakukan oleh tim teknis, mitra Desa dan pengurus KMP. Kesempatan ini merupakan verifikasi akhir dari pengurus KMP dan mitra desa untuk menentukan anggota yang berhak menerima.

Selain musyawarah, proses pencairan dana menjadi tahapan proses pelaksanaan PEMP. Proses pencairan dana program PEMP adalah dana dari KPKN diturunkan ke LEPP-M3 melalui rekening Bank Nagari Cabang Painan. KMP mengajukan permintaan penyediaan dana kepada LEPP-M3 sesuai dengan prioritas usulan jenis kegiatan dan

jumlah dana yang disepakati dalam musyawarah.

LEPP-M3 yang dikuasakan mencairkan dana di Bank Nagari Cabang Painan atas nama rekening PEMP 2002 LEPP-M3 dengan pengawasan dari Pimbagpro PEMP dan selanjutnya LEPP-M3 menyalurkan dana kepada rekening masing-masing KPM. Sebelum bantuan diterima, terlebih dahulu anggota KMP mengisi format kelengkapan pinjaman berupa surat perjanjian kerjasama pinjaman dana ekonomi produktif bagi anggota KMP dan pengurus.

Dengan mengisi perjanjian tersebut, diharapkan anggota KMP mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi tiap bulannya. Jika terjadi pelanggaran, yaitu melakukan penunggakan pembayaran tiga bulan berturut-turut maka pengurus KMP tidak akan ragu-ragu lagi melakukan penarikan terhadap bantuan yang diberikan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, barulah diberikan paket bantuan kepada anggota KMP sesuai dengan hasil musyawarah 5.

Namun, dalam proses pelaksanaan program PEMP di nagari Ampiang Perak, Kecamatan Sutera masih ada beberapa hal yang belum terealisasi. Hal ini karena tidak adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan *skill* bagi para anggotanya maupun menjadi mitra yang baik dalam menyelesaikan masalah. Para pengurus KPM terkesan hanya memikirkan bagaimana cara para peminjam atau pengguna dana PEMP dapat mengembalikan hutangnya dengan lancar dengan memberikan tekanan-tekanan seperti surat peringatan apabila terjadi tunggakan.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program PEMP

Program PEMP yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan mengentaskan kemiskinan pada masyarakat nelayan, terutama nelayan buruh. Dalam perjalanan pelaksanaan program PEMP, tentu tidak luput dari permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi, yang dimulai dari pihak pemerintah sebagai penanggung jawab dari program PEMP ini sampai kepada anggota KMP yang menjadi pengguna dana dari program tersebut.

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki peran yang cukup sentral, karena merupakan institusi yang bertanggung jawab terhadap program ini. Dalam buku *Pedoman Umum PEMP* disebutkan bahwa pemerintah melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan, kendala dan rencana tindak lanjut. Dalam pelaksanaannya, ternyata pihak Dinas Kelautan dan Perikanan tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi. Hal tersebut terlihat bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan hanya sekedar akibatnya masalah-masalah yang terjadi di KMP tidak diketahui oleh mereka karena yang mereka terima hanyalah laporan mengenai realisasi pengembalian kredit dari anggota KMP.

Selain itu, dalam pelaksanaan program PEMP, pemerintah tidak melakukan upaya pemberdayaan masyarakat secara kultural. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai penanggung jawab dari program tersebut seharusnya mengagendakan kegiatan untuk melakukan upaya pemberdayaan secara kultural seperti melakukan pembinaan kepada anggota KMP. Upaya tersebut tidak dilakukan karena yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan hanya sekedar memberikan bantuan kepada anggota KMP. Setelah dana bantuan diberikan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan hanya menerima laporan dari KMP dan LEPP-M3 tiap bulannya. Padahal, di dalam buku *Pedoman Umum PEMP* disebutkan bahwa penyusunan program PEMP terdiri dari program ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, dan infrastruktur. Tetapi, dalam proses yang dilaksanakan hanyalah program ekonomi saja.

Fungsi LEPP-M3 dalam program PEMP adalah melakukan pembinaan kepada KMP dimana secara administrasi, LEPP-M3 membina KMP. Namun, pembinaan kepada anggota KMP dilakukan oleh pengurus KMP dan LEPP-M3 hanya menerima laporan dari KMP kemudian direkap dan dilaporkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain itu, dalam penerapan di lapangan, pihak LEPP-M3 tidak pernah memberikan dukungan operasional kepada KMP, melainkan hanya sekedar menerima laporan dari pengurus KMP.

Hal ini juga disebabkan oleh struktur kepengurusan LEPP-M3 itu sendiri di mana kepengurusan LEPP-M3 lebih banyak didominasi oleh sekretaris, mulai dari pengurusan administrasi, penyampaian laporan ke Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan mengikuti pelatihan-pelatihan pengurus yang dilaksanakan di luar daerah. Bagi ketua sendiri tidak begitu banyak dilibatkan karena tidak menguasai masalah administrasi. Hal ini berpengaruh kepada kinerja pengurus LEPP-M3 yang tidak seimbang dalam pembagian kerjanya.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kelangsungan dari kegiatan PEMP, terutama kepada LEPP-M3, bahwa tidak ada anggaran yang diberikan untuk biaya operasional seperti membuat kantor, membeli komputer, dan lain-lain. Hal tersebut mengakibatkan pengurus LEPP-M3 terpaksa berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, pengurus LEPP-M3 sendiri mengakui kalau mereka tidak menerima sepeser rupiah pun sebagai uang kesejahteraan atas kerja yang mereka lakukan dari pemerintah, di mana upah yang mereka terima adalah pengembalian kredit dari anggota KMP, yaitu bunga yang ada sebanyak 1% dibagi rata untuk LEPP-M3 dan pengurus KMP. LEPP-M3 merupakan suatu lembaga yang berperan untuk memberikan dukungan operasional kepada KMP dengan memberikan pembinaan belum mampu menjalankan peran sebagaimana mestinya karena

LEPP-M3 hanya sekedar menerima laporan dari KMP.

Kelompok masyarakat pemanfaat adalah kelompok masyarakat yang memperoleh dana ekonomi produktif masyarakat untuk mengembangkan dan melaksanakan usaha ekonomi. Dalam *Pedoman Umum Pelaksanaan PEMP*, pengurus KMP memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana ekonomi produktif yang diterima oleh LEPP-M3 kepada anggota KMP, melaporkan perkembangan PEMP kepada LEPP-M3, mengadakan pertemuan bagi anggota KMP untuk mengevaluasi perkembangan usaha anggota KMP dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh anggota KMP, dan melakukan penarikan bantuan bagi anggota KMP yang tidak mau membayar cicilan kredit.

Dalam implementasinya, pengurus KMP telah melaksanakan kewajibannya seperti menyalurkan dana ekonomi kepada anggota KMP, melaporkan perkembangan kegiatan PEMP kepada LEPP-M3. Namun, masih ada yang belum dijalankan oleh pengurus KMP, seperti tidak adanya perkumpulan bagi para anggota yang semestinya dilaksanakan. Perkumpulan anggota tersebut diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana pembayaran kredit dari anggota, bagaimana kelangsungan usaha dan anggota, dan persoalan-persoalan lainnya. Dengan tidak adanya perkumpulan bagi anggota KMP, pengurus tidak mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi anggota, kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana kondisi dari bantuan yang mereka terima.

Dengan kinerja pengurus KMP tersebut mengakibatkan anggota KMP kurang diperhatikan. Salah satu contohnya adalah ketika terjadi kerusakan mesin yang dialami oleh seorang anggota, pengurus KMP tidak mau ambil pusing dengan kejadian tersebut. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada pengurus KMP, pengurus memberikan keterangan lain, yaitu kualitas barang yang diberikan dalam program PEMP sangat kurang, sehingga mengakibatkan mesin yang diberikan rentan mengalami kerusakan. Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat persoalan-persoalan yang diperoleh bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai tata cara penggunaan mesin yang baik, bagaimana cara perawatannya, karena dengan menggunakan mesin, maka nelayan harus menyesuaikan penggunaan teknologi tradisional ke modern.

Dalam tahap kegiatan program PEMP yang berlangsung dari bulan September sampai Nopember 2006, berjalan lancar tanpa ada kendala yang dihadapi, di mana mulai dari musyawarah 1 sampai musyawarah 4, masyarakat yang menjadi anggota KMP menyambut baik kehadiran program PEMP. Masyarakat mengetahui bahwa di daerah mereka akan dilaksanakan program PEMP yang bertujuan memberikan pinjaman modal kepada

masyarakat dan sambutannya sangat baik.

Pada dasarnya, permasalahan utama yang dihadapi nelayan buruh dalam pembayaran cicilan pinjaman kredit adalah faktor alam atau keadaan laut yang tidak bisa diprediksi. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan terjadinya tunggakan cicilan adalah rusaknya bantuan yang mereka terima. Kerusakan mesin yang dialami oleh anggota KMP sebanyak 5 unit, selain disebabkan oleh rendahnya kualitas mesin juga disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai tatacara penggunaan mesin yang baik sehingga mesin yang diberikan bisa tahan lama.

Selain itu, masalah yang dihadapi oleh anggota KMP dalam menjalankan peranannya sebagai anggota yaitu membayar cicilan kredit tiap bulannya disebabkan oleh faktor eksternal, seperti penghasilan yang tidak tetap karena hasil tangkapan yang tidak pasti, kondisi pekerjaan yang sangat dipengaruhi oleh keadaan alam, dan adanya kerusakan pada bantuan yang diberikan. Untuk faktor internalnya adalah nelayan buruh lebih mendahulukan memperbaiki mesinnya daripada membayar cicilan kreditnya.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis berpendapat bahwa program PEMP yang dilaksanakan oleh pemerintah belum optimal dalam pelaksanaannya. Di satu sisi, nelayan buruh cukup terbantu dengan pinjaman mesin dan dana bergulir, tapi sisi lainnya, pelaksanaannya masih ditemui kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut berasal dari masyarakat sendiri dan pemerintah, yaitu tingkat pendidikan yang rendah, ketergantungan kepada tengkulak, penguasaan teknologi penangkapan yang rendah mengakibatkan program PEMP berupa bantuan perahu dan mesin tidak efektif dan persoalan kultural seperti gaya hidup yang tidak produktif dan tidak efisien, pemalas menyebabkan penerapan program PEMP hanya bisa dinikmati oleh para nelayan pemilik/majikan dari nelayan-nelayan buruh.

Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan program PEMP, antara lain, proses pelaksanaan program dan evaluasi tidak dilakukan sepenuhnya dan tidak menyentuh langsung terjun ke masyarakat untuk melihat persoalan-persoalan yang ada dan program tidak tepat sasaran dikarenakan sebagian nelayan buruh mengalami kesulitan dalam menjalankan program PEMP seperti program bantuan kredit bergilir.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

(1) Program PEMP merupakan suatu program inovasi dalam usaha mengentaskan kemiskinan pada masyarakat nelayan buruh dengan 2

kegiatan besar, yaitu bantuan mesin perahu dan peminjaman modal usaha. Namun, dalam prosesnya, ada beberapa prosedur yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu verifikasi terhadap calon anggota di mana verifikasi yang digunakan tidak berdasarkan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam *Pedoman Umum PEMP*.

(2) Dalam pelaksanaannya, program PEMP dianggap suatu program yang memberikan sanksi-sanksi yang jelas bagi anggota KMP yang menunggak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada anggota KMP yang menunggak menimbulkan dampak yang negatif, karena sanksi yang diberikan adalah penarikan bantuan beserta dengan jaminannya.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam program PEMP adalah tidak adanya monitoring dan evaluasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengetahui perkembangan kesejahteraan nelayan buruh dan pelaksana program PEMP yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Akibat dari tidak adanya monev tersebut, maka pihak dinas tidak mengetahui masalah apa saja yang muncul dalam program PEMP (1).

Kendala lainnya adalah belum berfungsinya LEPP-M3 sebagai lembaga yang berperan memberikan dukungan operasional bagi anggota KMP dengan memberikan pembinaan, karena dalam struktur kepengurusan LEPP-M3 yang lebih banyak berperan adalah sekretaris yang hanya mengurus laporan kepada LEPP-M3 yang sifatnya hanya administratif.

Kendala yang dihadapi oleh anggota KMP dalam membayar kredit disebabkan oleh faktor eksternal seperti penghasilan yang tidak tetap yang dipengaruhi faktor alam atau cuaca, kerusakan mesin bantuan dan faktor internal yaitu seperti malas membayar karena kecewa bantuan yang diterima tidak sesuai dengan yang diminta.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa rekomendasi yang sangat diperlukan untuk keberlanjutan program terhadap masyarakat nelayan, yakni:

(1) Pada dasarnya berbagai program pembangunan masyarakat harus mengikutsertakan konsep pemberdayaan berbasis komunitas lokal. Dalam hal ini, program PEMP yang dilaksanakan di Nagari Ampiang Perak hanya menyentuh aspek ekonomi yang sekadar memberikan bantuan berupa materi saja. Untuk itu, apabila ada program pemerintah yang akan dilaksanakan, tidak melupakan aspek pemberdayaan masyarakat dilihat dari aspek sosial dan budaya.

(2) Pemerintah hendaknya memerhatikan setiap keluhan yang disampaikan dari masyarakat karena keluhan itu berupa masalah yang

dihadapi masyarakat, sehingga dapat dijadikan intropeksi bagi pelaksana program itu sendiri untuk membuat program pemerintah itu lebih baik lagi.

- (3) Sebagai organisasi tertinggi dalam program PEMP yang mengatasnamakan masyarakat, hendaknya LEPP-M3 memberikan pembinaan secara sosial dan budaya kepada KMP, bukan hanya sekedar menerima laporan dari KMP tiap bulannya. Pengurus LEPP-M3 seharusnya langsung turun ke lapangan dan melihat faktanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Acheson, James M. (1981). "Anthropology of Fishing". *Annual Review Anthropology Inc.* Vol. 10. P 275-316
- Armansyah, Andrea. (2008). "Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kampung Painan Selatan." Padang: Skripsi yang tidak dipublikasikan
- Boedhisantoso, S.(1999). Komunitas Lokal di Kawasan Pesisir dan Pembedayaannya. *Makalah Lokakarya Pembangunan Pranata Sosial Komunitas pesisir.* Depok 30 Mei – 1 juni 1999.
- Dahuri, Rokhmin. (1999). "Ekonomi Politik Sektor Perikanan." Dalam *Harian Umum Republika Departemen Kelautan dan Perikanan.* 2001. *Buku Pedoman Umum Program PEMP.*
- Emerson, Donald K. (1980). "Rethinking Artisanal Fisheries Development: Western Concept, Asian Experiences." World Bank Staff Working Paper.
- Fitrisia, Azmi. (1996). "Nelayan Kenagarian Painan (Tinjauan Sejarah Sosial Ekonomi." Padang: Skripsi yang tidak dipublikasikan
- Gie, The Liang. (1989). *Ensiklopedi Administrasi.* Jakarta: PT. Air Agung Putra.
- [Http:// www.pemprov-sumbar.go.id](http://www.pemprov-sumbar.go.id). 2010. *Profil Sumatera Barat:* diakses tanggal 15 Nopember 2010)
- [Http://www.urangminang.com](http://www.urangminang.com): diakses tanggal 20 Nopember 2010
- Kusnadi. (2002). *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan,* Yogyakarta: LkiS.
- _____(2005). *Akar Kemiskinan Nelayan,* Yogyakarta: LkiS.
- _____(2009). *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir.* Yogyakarta: Ar-RuzzMedia
- Miraza, Razak. (2009). "Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat." Medan: Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU. Skripsi yang tidak dipublikasikan
- Moleong, Lexy. (1991). *Metode Penelitian Kualitatif,* PT.Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mubyarto, Dkk. (1984). *Nelayan dan Kemiskinan,* Yayasan Agri Ekonomika.
- Nikijuluw, Victor P.H. (2001). "Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu," *dalam* Makalah pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Hotel Permata, Bogor, 29 Oktober 2001
- Profil Isian Data Monografi Nagari. (2009). Nagari Ampiang Perak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
- Satria, Arif, dkk. (2002). *Menuju Desentralisasi Kelautan.* Jakarta: Cisesindo
- Sri Haryono, Tri Joko. (2005). "Strategi Kelangsungan Hidup Nelayan: Studi tentang diversifikasi pekerjaan keluarga nelayan sebagai salah satu strategi dalam mempertahankan kelangsungan hidup" dalam *Jurnal Ilmiah Kependudukan* Vol. 7, No. 2, Juli - Desember 2005. Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat.* Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suyanto. (2003). *Kajian Model Pember-dayaan Ekonomi Rakyat di Desa Pantai Madura dan Kawasan Selatan Jawa Timur.* Surabaya: Lemlit Unair dengan Balitbang Propinsi Jatim.
- Yustika, Ahmad Erani. (2003). *Negara vs Kaum Miskin.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zamzami, Lucky. (2009). "Sistem Pengetahuan Lokal Nelayan Terhadap Teknologi Penangkapan Ikan pada Masyarakat Pasar Laban, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang" dalam *Jurnal FENOMENA* Volume 07, Nomor 02, September 2009, Hal. 71-83
- Zamzami, Lucky. (2009). "Studi Kualitatif Dampak Perubahan Sosial terhadap Amalan Merantau di Kalangan Nelayan." Satu Kajian Kes di Kelurahan Purus, Kota Padang: UKM Malaysia: Tesis yang tidak dipublikasikan.